

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan di Indonesia banyak menggunakan simbol berupa benda-benda yang mewakili suatu gagasan tertentu dalam setiap upacara adat. Walaupun simbol bukanlah nilai itu sendiri, tetapi simbol sangatlah dibutuhkan untuk kepentingan penghayatan akan nilai-nilai yang diwakilinya. Benda-benda tersebut mengandung nilai dan norma yang sangat berguna dalam mengatur tata kehidupan manusia. Namun seiring perjalanan waktu dan keterbatasan sumber daya alam mengakibatkan benda-benda tersebut sulit untuk didapatkan. Salah satu budaya yang turut terkena imbas dari kelangkaan tersebut adalah budaya perkawinan pada masyarakat Lamaholot di Kabupaten Flores Timur-Nusa Tenggara Timur (NTT).

Masyarakat Lamaholot menggunakan Gading Gajah yang kemudian disingkat GG sebagai *Belis* atau seserahan yang diberikan kepada keluarga perempuan pada saat upacara adat perkawinan. Bagi masyarakat Lamaholot GG merupakan salah satu benda yang digunakan dalam upacara perkawinan karena bagi masyarakat Lamaholot memiliki nilai-nilai tertentu. Dalam perjalanan waktu seiring perkembangan zaman, GG sulit ditemukan karena gajah telah menjadi salah satu kategori hewan langka yang tidak boleh diburu untuk diambil gadingnya.

Kondisi seperti yang dikemukakan diatas mengakibatkan pemenuhan tuntutan adat perkawinan sulit dilaksanakan. Agar nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat Lamaholot tetap berkelanjutan, maka dibutuhkan sebuah tindakan penyesuaian yang mengakomodir konsep pelestarian budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Dengan demikian kiranya penting untuk mengkonversikan GG dengan benda lain dalam adat perkawinan masyarakat Lamaholot. Hal ini semata-mata untuk menjamin dan menjaga keberlanjutan adat perkawinan pada budaya masyarakat Lamaholot.

Kebudayaan diamini sebagai identitas pemiliknya. Pelestarian budaya bangsa sebenarnya bermakna mempertahankan agar tidak hilang tergerus zaman dan mampu menyesuaikannya dengan konteks kekinian agar dapat diselaraskan

dengan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Penyelarasan ini terjadi karena adanya kesediaan dalam merealisasikan kebudayaan lokal secara lebih modern. Paradigma seperti ini lahir dari konstruksi pembangunan pendidikan yang kuat sehingga masyarakat tidak menempatkan budaya lokal sebagai hal yang kolot dan tidak menarik.

Warisan budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang adalah suatu kebanggaan yang dimiliki oleh setiap bangsa di dunia. Peradaban dan kebudayaan yang ada tersebut tentunya di bentuk dari tata nilai yang luhur. Nilai luhur tersebut kemudian diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Mengingat dalam warisan tersebut terdapat bermacam-macam nilai yang luhur maka harus dilestarikan bagi kepentingan generasi berikutnya. Agar nilai-nilai tersebut tidak hilang ditelan zaman maka kebudayaan harus disesuaikan dengan konteks kekinian sehingga tetap ada dan bertahan didalam sebuah masyarakat.

Salah satu budaya yang berkembang dimasyarakat Indonesia pada umumnya adalah upacara adat perkawinan. Semua daerah di Indonesia mempunyai adat perkawinan yang berbeda-beda, karena indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Perbedaan ini baik dari makna dan simbol maupun tata cara yang digunakan dalam upacara perkawinan. Dalam upacara perkawinan juga terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luhur dalam mengatur hubungan antara sesama manusia.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1983) mengemukakan bahwa upacara adat perkawinan karena adat dan upacara perkawinan sangat penting karena adat perkawinan akan tetap ada didalam suatu masyarakat berbudaya. Sekalipun tradisi perkawinan mengalami perubahan namun tetap menjadi unsur budaya yang dihayati, karena adat perkawinan mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang sangat esensial antar manusia yang berlainan jenis. Dalam adat perkawinan terkandung nilai dan norma yang sangat luas dan kuat untuk mengatur dan mengarahkan tingkahlaku setiap individu dalam suatu masyarakat. Pembinaan keluarga yang bahagia lahir batin, dengan menghayati nilai-nilai luhur dari tujuan dan tatakrama hidup berumah tangga, sebagaimana dilukiskan pada

simbol-simbol serta tata krama dalam adat perkawinan adalah miniatur dari kesatuan dan pembangunan bangsa. Dalam kaitannya dengan membina kesatuan bangsa, adat perkawinan memegang peranan penting, karena memungkinkan terjadinya perkawinan campur, baik antar suku bangsa maupun daerah. Dengan demikian dapat mempercepat proses kesatuan bangsa dalam wujudnya yang sempurna.

Dalam rangka menjaga kebudayaan agar tidak hilang ditelan zaman, pemerintah telah mengeluarkan *Aturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata* tentang kewajiban mempertahankan kebudayaan. Aturan tersebut tertuang dalam Nomor : 42 tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009, tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan. Dalam Pasal 19 yang berbunyi :

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelestarian kebudayaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan (lembaga adat, masyarakat adat, Desa, kelompok, perkumpulan, perhimpunan, atau yayasan), dan/atau forum komunikasi kebudayaan di provinsi, kabupaten/kota, dan Desa.
- (3) Peran serta masyarakat serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Berperan aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinnekaan, memperkokoh jati diri bangsa, menumbuhkan kebanggaan nasional, dan mempererat persatuan bangsa;
 - b. Berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan melalui dialog, temu budaya, sarasehan, dan lain sebagainya; dan
 - c. Memberikan masukan dan membantu kepala daerah dalam pelestarian kebudayaan.

Dengan demikian maka setiap warga negara berkewajiban untuk berpartisipasi dalam melestarikan budaya serta menghormati dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia.

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan terobosan untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan menyesuaikan keterbatasan sumber daya alam dan kebutuhan manusia. Penyesuaian yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya turut mempengaruhi sebuah kebudayaan dan bahkan melahirkan budaya baru. Hal ini menempatkan kebudayaan sebagai hal

yang dinamis. Ki Hajar Dewantara (Sulasman dan Gumilar, 2013, hlm. 151) bahwa “budaya itu mengalami perubahan, yaitu ada waktunya lahir, tumbuh, maju, berkembang, berubah, menjadi tua dan mati, seperti hidup manusia.” Hal ini terkait dengan teori evolusi kebudayaan, bahwa suatu budaya akan mengalami perubahan sesuai dengan jamannya.

Bidang sosial-budaya merupakan salah satu perspektif yang diusung oleh pembangunan berkelanjutan. Karena bidang sosial-budaya merupakan aspek penting yang berkaitan dengan kehidupan banyak orang. Selain perspektif sosial-budaya, pembangunan berkelanjutan juga mengusung aspek lainnya yakni aspek lingkungan dan aspek ekonomi sebagai suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Ketiga perspektif dimaksud diusung sebagai respon terhadap kondisi kekinian masyarakat yang secara urgen hadir dalam suatu mata rantai pembangunan. Urgensitas ketiga komponen ini secara signifikan terlihat dalam komunitas dan kompetensi masyarakat global. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah pemahaman baru untuk menjamin dan mempersiapkan masyarakat agar tidak gamang dalam menghadapi era globalisasi. Peningkatan pemahaman dan kesadaran global tentang perkembangan dunia menjadi isu utama pembangunan berkelanjutan.

Berbicara mengenai pembangunan berkelanjutan, yang sering muncul dibenak setiap orang adalah pembangunan dalam bentuk fisik seperti rumah, jembatan, jalan raya, pelestarian lingkungan dan berbagai hal lainnya. Namun lebih jauh dari itu ada hal yang tidak kalah pentingnya dari pembangunan yang sekedar berorientasi fisik. Pembangunan fisik harus didukung dengan pembangunan pola pikir sehingga apapun yang dilakukan selalu berorientasi pada pertimbangan rasional dan pertimbangan nurani yang luhur. Pertimbangan nurani yang luhur terakumulasi dalam pemahaman dan pemaknaan nilai-nilai budaya yang terlihat dalam tindakan nyata. Hal ini berfungsi untuk menyelaraskan ketersediaan sumber daya alam yang semakin terbatas dengan tingginya animo konsumtif masyarakat global.

Kesesuaian sumber daya alam yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia menjadi masalah utama dalam era keberlanjutan ini. Konsep tentang pembangunan

berkelanjutan muncul sejak tahun 1890-an. Pada saat itu PBB melalui UNESCO mencanangkannya sebagai tindakan nyata dalam memajukan perekonomian dan perkembangan sosial serta pelestarian terhadap lingkungan hidup (Kemendiknas 2010). Pembangunan berkelanjutan yang dimaksudkan oleh UNESCO mengacu pada peningkatan taraf hidup masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang efisien dengan mempertimbangkan keberadaan lingkungan sebagai tempat yang kondusif yang menjamin keberlangsungan hidup umat manusia. Selain itu pemanfaatan sumber daya alam yang ada dalam lingkungan kehidupan manusia juga harus menjamin pemenuhan kebutuhan jangka panjang serta mempertimbangkan keberadaan generasi-generasi yang akan datang.

Implementasi pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan ketiga perspektif seperti yang dikemukakan oleh UNESCO diatas. Untuk itu dibutuhkan instrumen khusus yang berfungsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga kerangka pembangunan berkelanjutan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Instrumen khusus tersebut muncul dari penjabaran *Education of sustainable for development (ESD)* yang secara khusus bertujuan untuk mendesain melaksanakan serta mengevaluasi hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan baik yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Dengan demikian aspek pendidikan dijadikan sebagai ujung tombak utama dalam merealisasikan dan menjamin terciptanya partisipasi publik.

Partisipasi publik dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan masyarakat sebagai obyek dan subyek dari pembangunan itu sendiri. Sebagai subyek pembangunan masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata sebagai *super sistem* yang mendorong percepatan dalam mewujudkan masyarakat madani/*civil society*. Dengan demikian berbicara tentang pembangunan berkelanjutan sebenarnya mengarah pada perubahan sosial yang bertolak pada pemahaman dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Dalam konteks keindonesiaan kita kiranya konsep *ESD* harus ditopang dengan pemahaman dari warga negara dalam mewujudkan partisipasi dimaksud. Oleh karena itu proses penyadaran untuk mengubah perilaku dan gaya hidup yang

cenderung konsumtif dan destruktif perlu ditanamkan dan dikembangkan mulai dari pendidikan formal. Ruang yang kiranya tepat dalam membentuk karakter warga negara melalui jalur pendidikan terakomodir melalui pendidikan kewarganegaraan (PKn). Namun lebih lanjut, pemahaman terhadap pendidikan kewarganegaraan harus juga mengarah pada lahirnya pola pendidikan lokal yang secara teknis tidak dapat direalisasikan dalam pendidikan formal. Hal ini mengingat PKn tidak hanya dapat dipelajari di persekolahan tetapi juga dimasyarakat. Cogan (dalam Budimansyah dan Suryadi, 2008:5):

Citizenship education or education for citizenship...The more inclusive term and encompasses both these in-school experiences as well as out-of-school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media etc, which help to shape the totality of the citizen.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan mencakup pengalaman belajar disekolah dan diluar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan.

Penjelasan diatas sesuai dengan salah satu tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Wahab dan Sapriya, (2011, hlm. 311) mengemukakan tujuan PKn adalah “Untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizens*).” Warga negara yang baik tentunya mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan tuntutan dan harapan negara. Azis Wahab (dalam Wahab dan Sapriya, 2011, hlm. 311) mengidentifikasi warga negara yang baik adalah “warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga negara, memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial ...”. Dengan berpartisipasi melestarikan budaya bangsa maka individu telah menjalankan tujuan dari PKn karena mampu menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang diharapkan oleh negara.

Upaya untuk mengubah perilaku dan gaya hidup bagi transformasi masyarakat yang positif ini berkaitan dengan pembentukan karakter warga negara. Cogan dalam Sapriya (2004) mengemukakan bahwa ada delapan karakteristik

yang perlu dimiliki warga negara sehubungan dengan semakin beratnya tantangan yang harus dihadapi dimasa mendatang. Karakteristik warga negara tersebut meliputi, *pertama*; kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga negara masyarakat global. *Kedua*; kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat. *Ketiga*; kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya. *Keempat*; kemampuan berpikir kritis dan sistematis. *Kelima*; kemauan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan. *Keenam*; kemauan mengubah gaya hidup dan pola makan pokok yang sudah biasa, guna melindungi lingkungan hidup. *Ketujuh*; memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak azasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb). *Kedelapan*; kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional. Dengan demikian pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan sangat berkaitan erat dengan PKn.

Berkaitan dengan partisipasi dan karakter warga negara dalam kerangka budaya maka penelitian ini berkenan untuk menelaah kondisi yang sedang terjadi pada masyarakat Lamaholot. Secara khusus akan menelusuri hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan GG serta pengkonversiannya dalam menjamin keberlangsungan upacara adat perkawinan. Kiranya kondisi riil kehidupan budaya akan dijadikan obyek dalam penelitian ini. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Somantri (dalam Wahab dan Saprya, 2011, hlm. 316); bahwa “Objek studi *Civics* dan *Civics Education* adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan dan negara.” Dengan demikian kebudayaan sangat erat kaitannya dengan PKn karena merupakan salah satu objek kajian dari PKn. Penelitian ini dilakukan tidak sekedar menelusuri fenomena yang terjadi namun lebih dari itu diniati untuk memberikan konstruk pemikiran baru yang merujuk pada terciptanya implementasi pembangunan berkelanjutan.

2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dijelaskan diatas, maka penulis mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut;

1. Pergantian GG sebagai *Belis* dalam budaya Lamaholot dengan benda lain dalam hal ini uang merupakan upaya melestarikan budaya. Sebab penggunaan GG sebagai *Belis* dalam budaya Lamaholot sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini karena gajah telah dimasukkan kedalam kategori hewan langka yang mengakibatkan berkurangnya peredaran GG.
2. Sebagai upaya menjamin keberlangsungan adat perkawinan maka masyarakat Flores Timur yang berbudaya Lamaholot menggunakan uang sebagai pengganti GG dalam upacara perkawinannya.
3. Bagi masyarakat Lamaholot GG memiliki nilai tersendiri dalam adat perkawinan. Oleh karena itu nilai-nilai yang terkandung dalam GG sebagai *Belis* harus tetap dipertahankan.
4. GG yang telah digantikan dengan benda lain (uang) diberikan kepada keluarga perempuan sebagai legalitas dari perkawinan dimaksud, dengan tidak mengabaikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sebuah GG sebagai *Belis*.

Identifikasi masalah diatas merupakan fenomena lapangan. Fenomena dimaksud terjadi karena ada niat baik dari masyarakat Lamaholot untuk menyesuaikan kebudayaan dengan kebutuhan riil yang sejalan dengan tuntutan zaman. Dengan demikian selanjutnya penelitian ini akan berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan bidang kebudayaan. Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus maka adapun pertanyaan penelitian yang disarikan dari identifikasi masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Lamaholot menggunakan GG sebagai *Belis* dalam upacara adat perkawinan?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Lamaholot terhadap konversi *Belis* GG ke bentuk lain ?

3. Bagaimana partisipasi masyarakat Lamaholot dalam pembangunan berkelanjutan?

3. Tujuan Penelitian

3.1. Tujuan Umum

Sebagaimana yang terdapat dalam rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang berkembang di masyarakat tentang; Konversi *Belis* GG dalam upacara adat perkawinan pada masyarakat Lamaholot di Kabupaten Flores Timur - Nusa Tenggara Timur, dengan mendeskripsikan bagaimana partisipasi warga negara dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

3.2. Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan alasan masyarakat Lamaholot menggunakan GG sebagai *Belis* dalam upacara adat perkawinan.
2. Mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat Lamaholot terhadap konversi *Belis* GG ke bentuk lain.
3. Mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat Lamaholot dalam pembangunan berkelanjutan.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara keilmuan (teoritik) maupun empirik (empiris).

4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau bahan kajian bagi perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan khususnya partisipasi masyarakat (*civic participation*) dalam menyikapi perubahan sosial-budaya menuju pembangunan berkelanjutan dalam bidang sosial-budaya. Penelitian ini kiranya dapat menjadi bahan pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan maupun bagi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam bidang kebudayaan sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah

lainnya agar mampu menyesuaikan tuntutan kebudayaan dengan perkembangan dan kondisi zaman. Selain itu hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, serta menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk menggali kembali partisipasi masyarakat dalam pembangunan budaya yang berkelanjutan.

4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dapat dijabarkan sebagai berikut;

- 1) Berkontribusi positif terhadap berbagai pihak mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan khususnya bidang kebudayaan.
- 2) Bagi peneliti: dapat mengetahui Fenomena yang berkembang dimasyarakat dalam bidang pembangunan berkelanjutan khususnya aspek kebudayaan dalam hal ini adat perkawinan.
- 3) Bagi masyarakat Lamaholot: melalui penelitian ini diharapkan agar budaya perkawinan dalam masyarakat Lamaholot dapat terus dilestarikan dengan menyesuaikan kondisi perkembangan zaman serta konteks pembangunan berkelanjutan.
- 4) Bagi pemerintah: secara khusus penelitian ini bisa dijadikan acuan bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam pembangunan berkelanjutan khususnya bidang budaya.
- 5) Bagi masyarakat umum: penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah wawasan keilmuan sekaligus sebagai stimulus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan khususnya dalam bidang budaya.

5. Penjelasan Istilah

Perlu adanya penjelasan istilah dan pembatasan pengertian dari berbagai istilah yang digunakan dalam tesis ini. Penjelasan-penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi warga negara merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Partisipasi warga negara pada awalnya lebih berfokus pada bidang politik. Hadirnya konsep pembangunan berkelanjutan mendorong lahirnya paradigma baru tentang partisipasi warga negara yang juga menyentuh perspektif sosial-budaya, ekonomi dan lingkungan.
2. Masyarakat Lamaholot merupakan komunitas masyarakat yang terdiri dari berbagai suku yang mempunyai latar belakang budaya dan tradisi yang sama. Masyarakat Lamaholot ini menetap di kabupaten Flores Timur dan Lembata, namun tidak semua masyarakat yang menetap di wilayah ini termasuk masyarakat Lamaholot. Karena terdapat warga pendatang dari daerah lain dan juga ada beberapa daerah yang tidak termasuk dalam komunitas masyarakat Lamaholot.
3. Konversi adalah perubahan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain.
4. *Belis* merupakan seserahan yang harus diberikan kepada keluarga mempelai perempuan sebagai syarat pengesahan suatu perkawinan secara adat.
5. Gading gajah adalah taring gajah yang dalam masyarakat Lamaholot digunakan sebagai *Belis* dalam upacara adat perkawinan.
6. Konversi *Belis* GG adalah penggunaan benda lain untuk mewakili wujud GG dalam upacara adat perkawinan masyarakat Lamaholot.
7. *Wajaklolon* merupakan tempat menaruh sirih pinang, tembakau dan daun lontar. Dalam adat perkawinan wadah ini dijadikan tempat meletakkan uang sebagai pengganti wujud GG yang kemudian akan diberikan kepada pihak perempuan.

6. Struktur Organisasi Tesis

Struktur penulisan tesis yang akan ditulis terdiri dari 5 bab, yakni:

Bab I tentang pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan tesis.

Bab II tentang kajian pustaka yang meliputi; partisipasi masyarakat, kebudayaan, konsep nilai, konsep pembangunan berkelanjutan, konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian.

Bab III tentang metode penelitian. Adapun sub bab yang dibahas dalam bab ini mencakup lokasi dan subjek penelitian, pendekatan dan metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan temuan penelitian serta tahap-tahap pelaksanaan penelitian di lapangan.

Bab IV tentang temuan dan pembahasan. Pada bab ini dibahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V tentang kesimpulan dan rekomendasi. Pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu:(1) Simpulan dan (2) Rekomendasi.